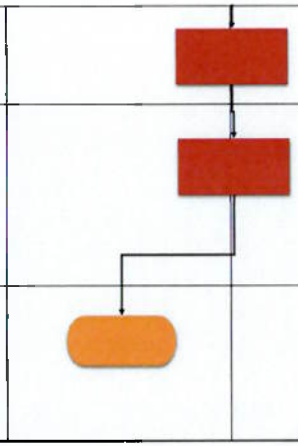
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-14.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
NAMA SOP		**: PERUBAHAN STATUS PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL YANG TERINTEGRASI DENGAN SABH AHU ONLINE**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami peraturan per-Undang-Undangan mengenai Perseroan Perorangan 2. Memahami ketentuan perubahan Perseroan Perorangan 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Teknologi Informasi 2. SOP Pendirian Perseroan Perorangan 3. SOP Perubahan Perseroan Perorangan 4. SOP Perbaikan Data Perseroan Perorangan 5. SOP Pembubaran Perseroan Perorangan	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Perseroan Perorangan 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Daftar Persyaratan permohonan 6. Kumpulan peraturan per-Undang-Undangan terkait 7. Buku agenda/ register
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai standar peraturan yang berlaku, maka kinerja pelayanan Direktorat Badan Usaha tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUBAHAN STATUS PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL YANG TERINTEGRASI DENGAN SABH AHU ONLINE

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon (Notaris)	Sistem Aplikasi SABH	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masuk ke laman *www.ahu.go.id.* - Pilih Menu AHU Perseroan Terbatas				*Real time*	laman ahu	pemohon
2	Malekukan Registrasi Akun - Klik Login pada laman AHU PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS			Akun Notaris Password	*Real time*	akun	kelengkapan data
3	Mengajukan Permohonan Perubahan Perseroan Terbatas - Klik Menu Perubahan PTP			Nama Perseroan Perorangan Nomor voucher	*Real time*	Laman PTP	Setelah pemohon pilih atau klik *Perubahan PTP* akan diarahkan pada menu lanjutan untuk perubahan PTP
4	Membeli Voucher Perubahan PT melalui Simpadhu dan Pembayaran melalui aplikasi YAP			Kode voucher	*Real time*	Nomor Voucher	Notaris mendapatkan kode voucher dengan status "Sudah bayar"
5	Memasukkan Kode Voucher, dan memilih Persyaratan yang harus dipenuhi - Klik menu "saya yakin"			Dokumen persyaratan Centang persyaratan	*Real time*	laman PTP	Centang Disclaimer: saya menyatakan berkas....
6	Mengisi Data Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar - Klik "lanjutkan"			Akun Pemohon	*Real time*	Laman PTP	menu pendirian pada laman PTP
7	Mengisi Data Isian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar - Klik menu Pilih jenis perubahan yang diinginkan - Klik Lanjutkan bila isian sudah sesuai			Akun Pemohon	*Real time*	Kode Voucher	kode voucher dari hasil pembelian voucher
8	Mengisi Data Isian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan			Alamat Perseroan data modal usaha (max 5 Milyar) data kegiatan usaha data pemilik usaha	*Real time*	Form Isian Data	Isian lengkap data perseroan

9	Melakukan pratinjau terhadap kelengkapan dan kesesuaian permohonan dan Konfirmasi		Data Pemilik Manfaat	*Real time*	Form Isian Data	
10	Melakukan unggah Akta Perubahan PTP Ke PT		Akun Pemohon	*Real time*	Konfirmasi Surat Pernyataan dan Pratinjau Pendaftaran	Diberikan batas waktu maksimal 7 hari dari tanggal transaksi, jika lewat dari 7 hari belum ada konfirmasi dari Pemohon, maka permohonan dianggap batal dan Pemohon dapat melakukan permohonan kembali dari
11	Melakukan Cetak Surat: - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar - Pemberitahaun Perubahan Anggaran Dasar - Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan		Pemohon	*Real time*	Surat telah dicetak	